

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah di bentuk Satuan Organisasi Tata Kerja baru bernama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Yaitu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati. Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena kemandirian tersebut dapat terwujud apabila sumber-sumber penerimaan daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi diantaranya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah

Jadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mempunyai beberapa fungsinya pada pelaksanaannya, diantaranya yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

Untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan tugas daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, sudah menjadi tugas penting Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

Tugas penting tersebut adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai atau mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas daerah, oleh karena itu sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus diarahkan atau berorientasi kepada tugas yang diembannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai Visi **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Dinamis dan Akuntabel dalam Menunjang Visi Misi Kabupaten Subang”**. Dengan visi misi ini terkandung maksud semua aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang tergerak/termotivasi/terpacu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dan penerimaan bagian daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perluasan cakupannya, dengan demikian diperlukan upaya peningkatan penggalan potensi sumber daya PAD yang ada dan perluasan objek dan subjek jenis pungutan, peninjauan dan penyesuaian tarif pungutan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Sebagai operasionalisasi landasan filosofis atau visi adalah misi, sedangkan misi yang diemban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang adalah:

Misi Pertama : Meningkatnya Pendapatan Daerah;

Misi Kedua : Tertibnya Penyusunan Anggaran;

Misi Ketiga : Terciptanya Pelayanan Administrasi Keuangan;

Misi Keempat : Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel;

Misi Kelima : Tercatatnya Aset Daerah;

Misi Keenam : Meningkatnya Sumber daya Manusia yang Profesional;

4.1.3 Kondisi Geografis dan Demografis Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Subang

Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berupa dataran, sedangkan bagian Utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa. Sebagian besar wilayah Pada bagian selatan kabupaten Subang berupa Perkebunan, baik perkebunan Negara maupun perkebunan rakyat, hutan dan lokasi Pariwisata. Pada bagian tengah wilayah kabupaten Subang berkembang perkebunan karet, tebu dan buah-buahan dibidang pertanian dan pabrik-pabrik dibidang Industri, selain perumahan dan pusat pemerintahan serta instalasi militer. Kemudian pada bagian utara wilayah Kabupaten Subang berupa sawah berpengairan teknis dan tambak serta pantai.

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan batas-batas wilayah Kabupaten Subang sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas – batas wilayah Kabupaten Subang

<u>Utara</u>	<u>Laut Jawa</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Bandung</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Purwakarta</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Indramayu</u>

(Sumber : Arsip Kantor BKAD 2018)

Berdasarkan tofografinya, wilayah kabupaten Subang dapat dibagi ke dalam 3 zona, yaitu:

4.1.3.1 Daerah Pegunungan (Subang bagian Selatan)

Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1500 m dpl dengan luas 41.035,09 hektare atau 20 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Jalancagak, Ciater, Kasomalang, Cisalak, Sagalaherang, Serangpanjang. sebagian besar Kecamatan Jalancagak, Cisalak dan sebagian besar Kecamatan Tanjungsiang.

4.1.3.2 Daerah Berbukit dan Dataran (Subang bagian Tengah)

Daerah dengan ketinggian antara 50 – 500 m dpl dengan luas wilayah 71.502,16 hektare atau 34,85 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi wilayah Kecamatan Cijambe, Subang, Cibogo, Kalijati, Dawuan, Cipeundeuy, sebagian besar Kecamatan Purwadadi, Cikaum dan Pagaden Barat.

4.1.3.3 Daerah Dataran Rendah (Subang bagian Utara)

Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl dengan luas 92.639,7 hektare atau 45,15 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Pabuaran, Pagaden, Cipunagara, Compreng, Ciasem, Pusakanagara, Pusakajaya Pamanukan, Sukasari, Legonkulon, Blanakan, Patokbeusi, Tambakdahan, sebagian Pagaden Barat.

4.1.4 Iklim Kabupaten Subang

Tingkat kemiringan dan Iklim dilihat dari tingkat kemiringan lahan, sekitar 80.80 % wilayah Kabupaten memiliki tingkat kemiringan 0° - 17°, 10.64 % dengan

tingkat kemiringan 18° - 45° sedangkan sisanya (8.56 % memiliki kemiringan di atas 45° . Secara umum wilayah Kabupaten Subang beriklim tropis, dalam tahun 2005 curah hujan rata-rata pertahun 2.352 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Dengan iklim yang demikian, serta ditunjang oleh adanya lahan yang subur dan banyaknya aliran sungai, menjadikan sebagian besar luas tanah Kabupaten Subang digunakan untuk Pertanian.

4.1.5 Penduduk

Penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2012 berjumlah 1.501.647 orang, yang terdiri atas 759.408 orang laki-laki dan 742.239 orang perempuan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,64%. Dengan luas Kabupaten Subang sebesar 2051,76 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2012 mencapai 732 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang masih relatif rendah, merupakan indikasi bahwa Kabupaten Subang bukan merupakan daerah tujuan urbanisasi. Kebijakan pemerintah yang memposisikan Kabupaten Subang sebagai salah satu lumbung padi Jawa Barat, juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk serta kepadatan penduduk di wilayah ini.

Pertumbuhan penduduk selalu dipengaruhi oleh faktor tingkat kelahiran/kematian dan migrasi (perpindahan penduduk antar kabupaten). Untuk menghindari permasalahan yang kompleks akibat tingginya kepadatan penduduk maka pengendalian penduduk melalui berbagai cara yang tepat tentunya harus dilakukan. Laju urbanisasi yang tinggi yang mengakibatkan permasalahan sosial di daerah perkotaan juga harus ditekan, karena selain menimbulkan masalah sosial di

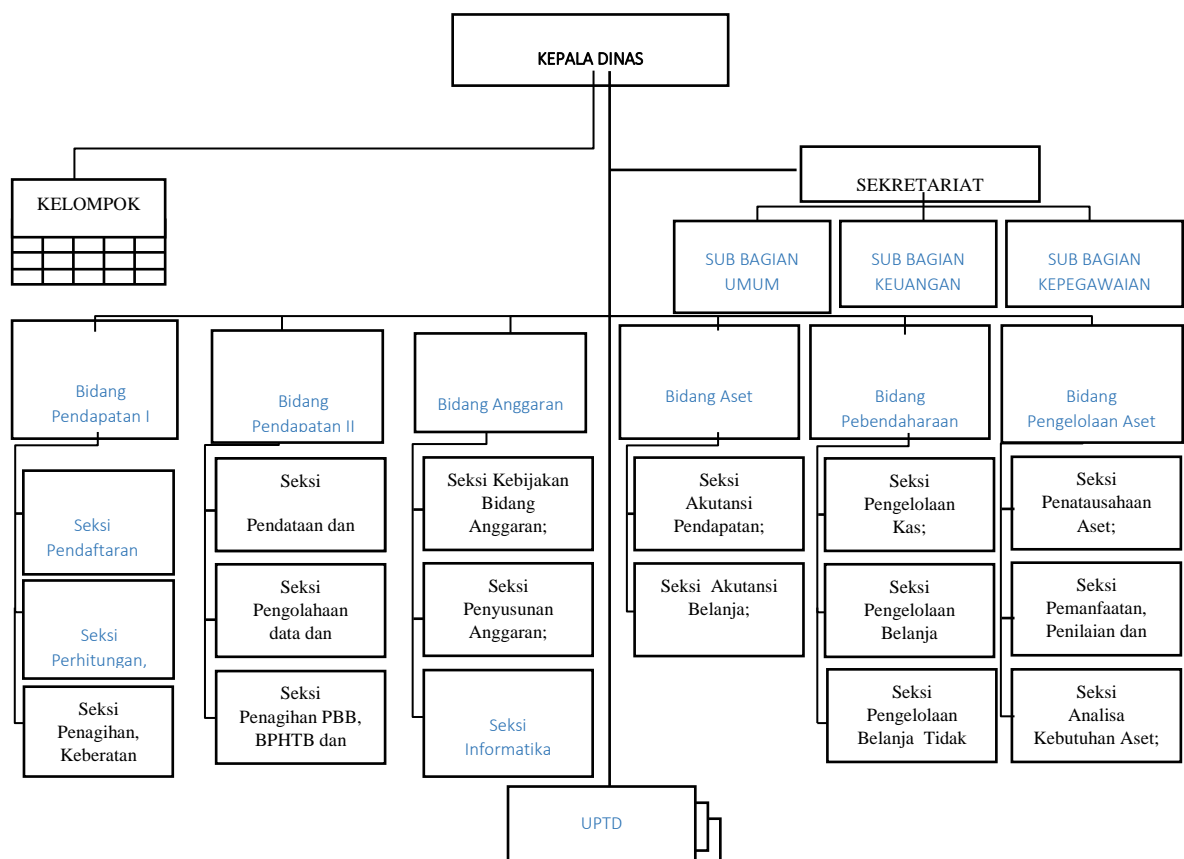
daerah perkotaan, urbanisasi juga meninggalkan ruang kosong dipedesaan (banyak lahan garapan yang tidak tergarap secara optimal dan berkurangnya sumber daya manusia berkualitas di pedesaan).

4.1.6 Struktur Birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Subang

Berikut ini akan menampilkan foto dari struktur Birokrasi Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang



(Sumber: Arsip BKAD Subang 2018)

Adapun perincian tugas dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memotivasi serta mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dinas dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta pengelolaan perpustakaan dinas.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Pendapatan I

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penyuluhan, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi

daerah dan pelaksanaan penegakan sanksi hukum, pengelolaan keberatan, permohonan banding dan permohonan angsuran.

Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Seksi Perhitungan, Penetapan dan Angsuran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perhitungan, penetapan dan keberatan objek/wajib pajak daerah/retribusi daerah.
- c. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penagihan pasif dan penagihan aktif atas tunggakan pajak daerah/retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, mengelola pengajuan keberatan atas penetapan pajak daerah/retribusi daerah, menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan asli daerah.

4. Bidang Pendapatan II

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan dari dana perimbangan dari pemerintah dan pemerintah daerah propinsi, yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain;

Bidang Perimbangan, membawahkan :

- a. Seksi Bagi hasil Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari hasil pajak.

- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak.
- c. Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari pendapatan lain-lain di luar pajak dan bukan pajak.

5. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah ;

Bidang Anggaran, membawahkan :

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data anggaran bidang pelayanan administrasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dibidang penyusunan anggaran dibidang administrasi.
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Program mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data anggaran bidang pelayanan administrasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dibidang penyusunan anggaran dibidang program.
- c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran.

6. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan, penelitian/pemeriksaan, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan Akuntansi pendapatan dan belanja daerah ;

Bidang Akuntansi, membawahkan :

- a. Seksi akuntansi Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan, penelitian/ pemeriksaan, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan akuntansi pendapatan daerah.
- b. Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan, penelitian/pemeriksaan, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan akuntansi belanja daerah.

7. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan daerah ;

Bidang Perbendaharaan, membawahkan:

- a. Seksi Pengelolaan Kas mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan kas daerah.
- b. Seksi Pengelolaan Belanja mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan belanja daerah.

8. Bidang Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengolahan, penganalisaan dan pengelolaan aset dan investasi Pemerintah Daerah.

Bidang Aset dan Investasi, membawahkan :

- a. Seksi Aset Bergerak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan aset/barang bergerak pemerintah daerah.
- b. Seksi Aset Tidak Bergerak Bergerak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan aset/barang tidak bergerak pemerintah daerah
- c. Seksi Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan investasi pemerintah daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Yaitu, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari semua bidang yang di jelaskan di atas, Bidang Asetlah yang mempunyai kewajiban dalam mengoprasionalakan sistem informasi Aset pemerintah.

4.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- 3 Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018;
- 8 Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.535-BP4D/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.42-BP4D/2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017-2018.

4.1.8 Dasar Hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4.1.9 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

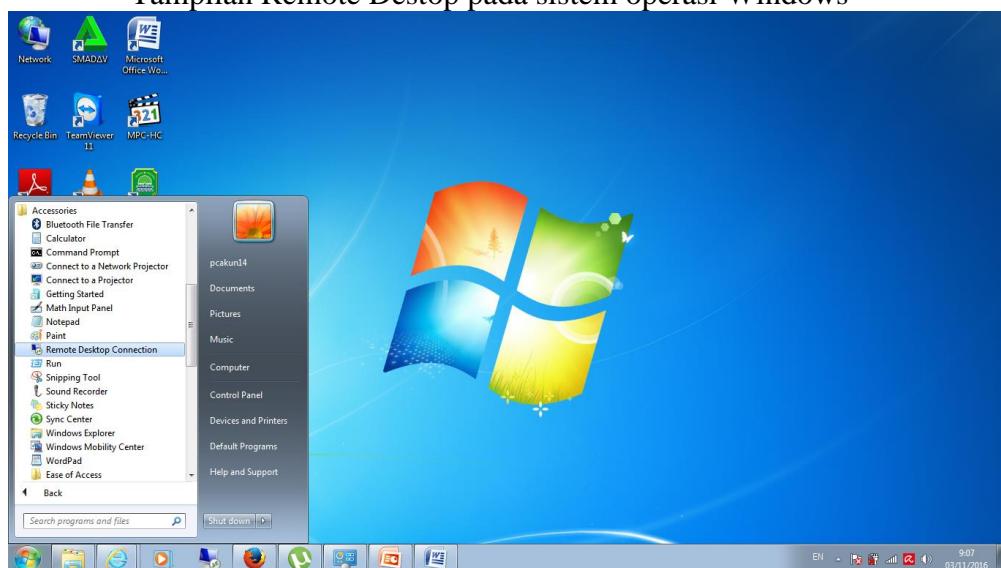
Sistem Informasi Aset Pemerintah Kabupaten Subang merupakan prosedur untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Aset Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati No. 44 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati No. 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Prosedur dalam sistem Akuntansi ini, mengatur teknis penyusunan dan penyajian laporan keuangan sejak analisis transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan baik secara manual ataupun terkomputerisasi. Sistem Akuntansi juga menjelaskan transaksi laporan dari kecamatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas contohnya laporan keuangan bulanan dari kecamatan, yang di dalamnya terdapat gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan beras, iuran asuransi kesehatan dan lain sebagainya.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah merupakan sebuah Aplikasi yang berbentuk Web yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah khususnya pada Bidang Akuntansi Kabupaten Subang, untuk menjalankan Aplikasi ini dibutuhkan dukungan kinerja aparatur yang baik untuk mendukung kinerja yang lebih baik, efisien dan mempermudah kinerja. Sistem Informasi Aset Pemerintahan ini hanya digunakan oleh bagian akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan bagian akuntansi semua kecamatan di Kabupaten Subang.

Berikut ini langkah langkah pengoprasian Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang perlu diperhatikan untuk menjaalnkan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan adalah adanya Koneksi Internet yang memadai, dimana Sistem Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah ini menggunakan Remote Desktop yaitu kita akan meremote system yang ada di server untuk melakukan aktifitas, Cara untuk mengaktifkan remote desktop pada Sistem operasi windows 7 atau diatasnya adalah Sebagai Berikut :

Berikut ini tampilan remote destop pada sistem operasi window 7 apabila kita akanmasuk kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Gambar 4.2
Tampilan Remote Destop pada sistem operasi Windows

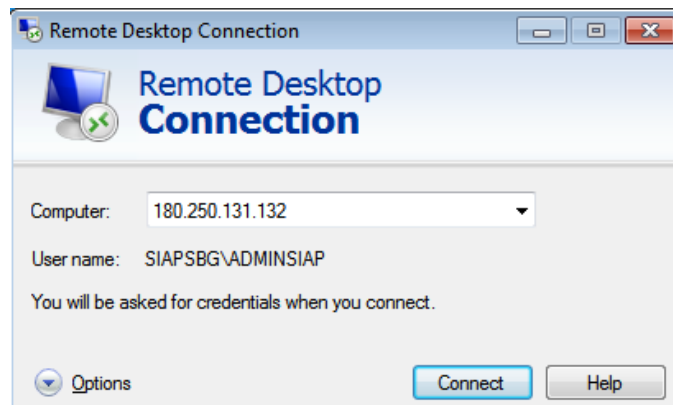


(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Gambar diatas menunjukkan tampilan remote destop pada sistem operasi window apabila kita akanmasuk kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah. Setelah itu akan muncul tampilan Sebagai Berikut :

Berikut ini tampilan remote desktop apabila kita akan masuk kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Gambar 4.3
Tampilan Remote Desktop

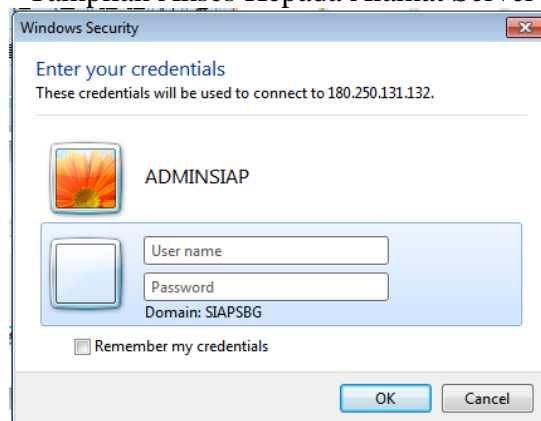


(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Gambar diatas menunjukkan tampilan remote desktop apabila kita akan masuk kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, kemudian klik connect untuk masuk ke halaman selanjutnya.

Berikut ini tampilan akses kepada alamat server untuk masuk kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Gambar 4.4
Tampilan Akses Kepada Alamat Server



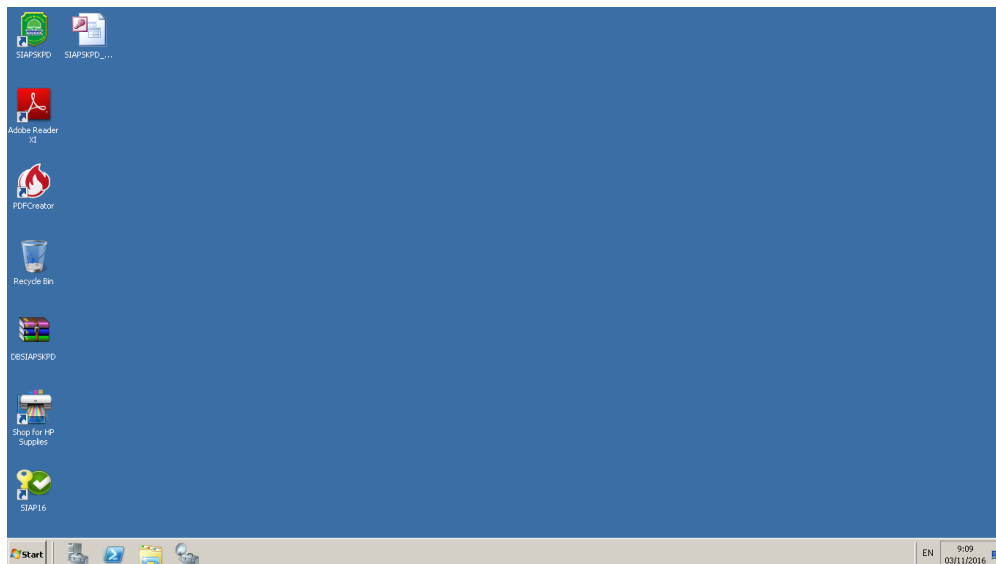
(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Halaman ini berfungsi sebagai Remote / Akses kepada Alamat Server, dimana Untuk Alamat Server SIAP adalah : 180.250.131.132. Selanjutnya Kita akan masuk Kepada User/Pengguna Sistem SIAP , User Name dan Password akan dikonfirmasi kepada Petugas Akuntansi Setiap SKPD.

Berikut ini tampilan remot desktop connection untuk masuk kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Gambar 4.5

Tampilan Remote Desktop Connection



(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Gambar di atas merupakan tampilan Remote Desktop Connection, kemudian Pilih Icon SIAPSKPD dan akan muncul seperti dibawah ini :

Berikut ini tampilan untuk login kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah

Gambar 4.6
Tampilan Untuk Login kedalam Aplikasi SIAP

(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Gambar di atas merupakan tampilan untuk login kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, untuk login kita harus memasukan Tahun Anggaran, Periode TA, SKPD dan User Name/Pasword.

Keterangan

Tahun Anggaran : 2016

Periode TA : Murni / Perubahan

SKPD : Nama SKPD Petugas Akuntansi

Username dan Paswor Akan diberikan Kepada Petugas Akuntansi kecamatan oleh aparaturn Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

Berikut ini merupakan tampilan halaman depan atau menu pada aplikasi sitem informasi akuntansi pemerintah:

Gambar 4.7

Tampilan Menu Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan



(Sumber : Modul Sistem informasi Akuntansi Pemerintah 2019)

Gambar diatas merupakan Tampilan Menu Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan yang dibuka melalui user name kecamatan Subang.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Produktivitas Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Pada pelaksanaannya produktivitas kinerja yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang tergambar pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan dan untuk mempermudah kinerja aparatur yang dulunya manual sekarang lebih modern hanya dengan menginput kedalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Produktivitas merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh aparat untuk memperoleh hasil maksimal dimana dalam pelaksanaannya untuk melihat tercapainya suatu

produktivitas maka dilihat dari beberapa faktor diantaranya *input*, *output*, efektivitas dan efisien.

4.2.1.1 *Input* Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan *input* yang banyak agar sasaran dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Setiap *input* memiliki tentu memiliki sasaran, yaitu berupa sumber daya seperti kesiapan awal, sumber daya manusia, waktu, dan sumber daya yang dimiliki untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan organisasi. Setiap organisasi atau instansi pemerintahan membutuhkan jumlah faktor kinerja yang lebih besar jika dibandingkan dengan organisasi yang lebih kecil. Sehingga setiap organisasi dapat mengetahui unit kerja yang terdapat dalam sebuah organisasi dan dari tiap unit itu dapat memberikan gambaran mengenai produktivitas serta dapat memberikan perbaikan pada setiap unit kerja.

Produktifitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang memiliki *input* yang mendukung produktifitas kerja. Dana merupakan salah satu bagian *input* yang penting pada saat proses kerja dan pelayanan berlangsung. Pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, dana yang dimaksud adalah uang insentif bagi para aparaturnya ketika berhasil melaksanakan tugas sesuai dengan target yang ditentukan. Dana insentif ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi tambahan kepada para aparaturnya untuk dapat meningkatkan

produktifitas kerja dan memeberikan semangat saat melakukan kerja. Meskipun diakui oleh aparatur Kecamatan Bagian akuntansi Kabupaten Subang, bahwa dana yang anggarkan untuk menunjang produktivitas kinerja aparatur tidak begitu besar sesuai dengan harapan dari para aparatur. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf fungsional umum bahwa,

“Kita diberikan insentif ketika berhasil atau beres dalam penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah untuk memenuhi tugas yang harus dikerjakan dan sesuai dengan target yang ditentukan. Tapi memang uang insentif itu dirasa tidak begitu sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan. Tetapi uang insentifnya sangat kecil tidak sesuai dengan yang kita kerjakan .” (3/07/2019)”

Penyataan tersebut menjelaskan bahwa adanya dana yang dianggarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang bagi para aparaturnya untuk memotivasi kinerja dari aparatur tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Namun, intensif yang diterima tidak begitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para aparatur dinilai dari apa yang mereka lakukan di lapangan guna meningkatkan produktivitas kinerja Aparatur Kecamatan Bagian Aset dan Aparatur Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang secara keseluruhan. Meskipun dirasa kurang, aparatur Kecamatan Bagian Aset dan Aparatur Bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang tidak begitu mempermasalahkan uang insentifnya karena dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah mereka bisa mengerjakan laporan secara cepat yaitu hanya dengan menginputkan data kedalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah mereka tidak perlu datang langsung ke bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Input dilakukan oleh bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang adalah diadakannya rapat koordinasi dan rapat teknis yang membahas persoalan-persoalan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang dihadapi dan teknis penyelesaian yang harus dilakukan. Rapat teknis dan rapat koordinasi yang dilakukan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagai cara untuk melakukan koordinasi terkait teknis kegiatan input data bulanan pada aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang harus dilaksanakan.

Rapat teknis adalah rapat yang dilakukan antara kepala badan, kepala bidang dan Sub Bidang atau perwakilannya untuk membahas persoalan terkait laporan keuangan daerah secara umum. Sedangkan, rapat koordinasi adalah rapat yang dilakukan bidang atau sub bidang untuk membahas persoalan laporan keuangan dari kecamatan yang lebih spesifik sesuai dengan sektor kecamatan masing-masing.

Berikut ini foto tentang rapat teknis penerapan sistem informasi Akuntansi pemerintah oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang dihadiri oleh aparatur bagian Akuntansi dari kecamatan:

Gambar 4.8
Rapat Teknis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang
dihadiri oleh aparatur bagian akuntansi dari kecamatan



(Sumber: Dokumen BKAD 2018)

Gambar diatas merupakan rapat yang dilakukan oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, yang dihadiri oleh seluruh aparatur bagian akuntansi kecamatan di Kabupaten Subang, bahwasannya pada awalnya penerapan sistem informasi Akuntansi pemerintah ini sudah dipersiapkan secara matang, karena pada pelaksanaannya aparatur bagian akuntansi kecamatan di KabupatenSubang diberikan pelatihan dalam penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Seperti yang disampaikan oleh kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait rapat koordinasi yang dilakukan untuk membahas persoalan penerapan aplikasi Sistem informasi Akuntansi Pemerintah

yang di hadiri oleh SKPD dari semua kecamatan di Kabupaten Subang dan penyelesaian terhadap persoalan pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

“Rapat teknis dan rapat koordinasi dilakukan untuk melakukan pembahasan terhadap persoalan penerapan aplikasi sistem informasi Akuntansi pemerintah. Rapat itu juga dimaksudkan untuk mencari solusi bersama yang sesuai dan dapat direalisasikan oleh aparatur Kecamatan bagian akuntansi dan Aparatur Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.” (03/07/2019)”

Maksud dari pernyataan kepala Bidang Akuntansi diatas yaitu rapat teknis yang dilakukan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sering dilakukan bersama aparatur bagian akuntansi di Kecamatan Kabupaten Subang, untuk membahas persoalan-persoalan atau masalah yang terjadi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

Rapat koordinasi dan rapat teknis yang dilakukan tiga bulan sekali yang berlokasi di kantor Badan Keuangan dan Aset Darah Kabupaten Subang tersebut dapat dikatakan sebagai *input* dari sebuah produktivitas kinerja bagi aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagai salah satu faktor dalam penentuan program kerja yang akan dilaksanakan, sebagai harapan dapat menemukan solusi dari persoalan penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah.

Insentif dan rapat-rapat yang dilakukan merupakan input yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Aparatur Kecamatan Bagian Akuntansi dan Aparatur Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Meskipun dalam pelaksanaannya insentif yang diterima oleh aparatur dirasa tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan dilapangan. Pemberian insentif baiknya

diberikan dengan nominal yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aparatur. Pembahasan insentif dirasa akan berpengaruh pada kinerja para aparatur Kecamatan dan aparatur bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini perlu dilakukan agar para aparatur terus termotivasi dan semangat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pelaksanaan rapat teknis dan rapat koordinasi yang dilakukan tiga bulan sekali yang berlokasi di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang merupakan salah satu kegiatan yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Rapat teknis dan rapat koordinasi akan membuat koordinasi yang berlangsung dalam proses pelayanan informasi dalam aplikasi sistem informasi Aset pemerintah agar saling terhubung satu sama lain khususnya dengan aparatur yang berada di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dalam mencapai target-target capaian yang telah ditentukan.

Berdasarkan yang sudah di paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Produktivitas khususnya *Input* pada peneran aplikasi sistem informasi Aset pemerintah di Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari sering dilakukannya rapat yang dilakukan oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang dihadiri oleh semua aparatur bagian akuntansi di Kabupaten Subang untuk membahas permasalahan pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

4.2.1.2 Output Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Output merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang telah berjalan di Bagian Akuntansi Badan Keuangan Aset Pemerintah Kabupaten Subang yang dihasilkan dari input awal. Setelah melakukan input yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan program-program yang bisa meningkatkan kinerja, Bagian Akuntansi Badan Keuangan Aset Pemerintah Kabupaten Subang mulai melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut. *Output* yang dihasilkan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan Aset Pemerintah Kabupaten Subang adalah program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Output pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu berupa hasil akhir dari sebuah program atau penerapan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi pemerintah. Pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini yang dijalankan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Bagian Akuntansi Kecamatan di Kabupaten Subang .

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang *output* atau hasil apa yang telah di dapat/diraih ataupun dihasilkan oleh aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yang dijalankan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut:

“jadi kalau *output* atau apa yang dihasilkan berupa prodak dari penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yan di jalankan oleh Aparatur Bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Bagian Akuntansi di kecamatan Kabupaten Subang yaitu berupa laporan keuangan yang biasanya kita bukukan berupa laporan keuangan kecamatan yang selanjutnya untuk di jadikan laporan pertanggung jawaban keuangan” (3/07/2019)”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait *Output* dari peneran sistem informasi akuntansi pemerintah mengatakan bahwa yang dihasilkannya berupa laporan keuangan kecamatan dan laporan keuangan yang selanjutnya dijadikan sebagai peraturan daerah kabupaten subang berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah pertahunnya,

Output pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yang dijalankan aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang ini memiliki kelemahan pada pelaksanaannya diman pada saat pengumpulan data padasaat akan dilakukan penyusunan laporan untuk dijadikan buku laporan sering terjadi ada kekurangan inputan yang belum di input pada aplikasi sistem informasi kuntansi pemerintah

Berikut ini akan ditampilkan berupa *output* pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah berupa buku rancangan peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.

Gambar 4.9
Buku rancangan peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah



(Sumber: Dokumen BKAD 2019)

Gambar diatas merupakan hasil yang diperoleh atau *output* dari penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah berupa rancangan peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah. Buku Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah ini selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati untuk di setuju atau di koreksi dan selanjunya untuk dijadikan patokan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Subang.

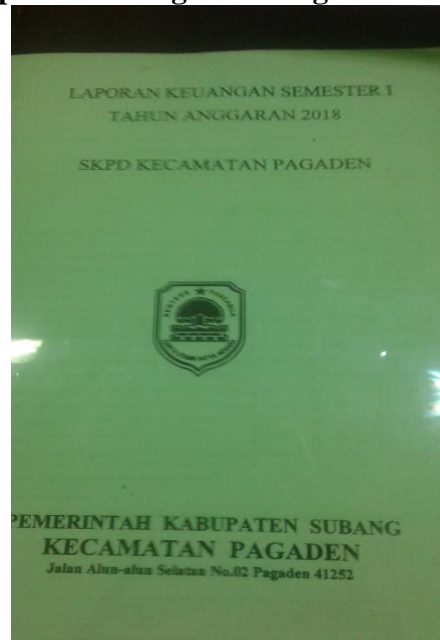
Output pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah juga menghasilkan laporan keuanga dari kecamatan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Subang berupa pembukuan laporan keuangan, untuk mendapatkan kualitas *output* yang baik aparatur Badan Keuangan Asert Daerah Kabupaten Subang dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah bersinergi serius dalam pelaksanaannya. Pada penerapannya sistem informasi akuntansi pemerintah haruslah di dukung oleh sumberdaya manusia yang baik untuk menunjang

keberhasilan sebuah program, disini pada pada penerapan aplikasi sistem informasi Aset bisa dikatakan sumberdaya manusianya kurang bisa diandalkan karena keterbatasannya kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur yang ada di kecamatan yang akan melakukan penginputan data pada aplikasi sistem informasi Akuntansi pemerintah.

Peranan pemimpin disini sangat diperlukan untuk meraih hasil yang sempurna pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, pemimpin haruslah tanggap dengan keadaan disekitar yang berhubungan dengan program penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah khususnya pada sumber daya manusianya yang akan menjalankan aplikasi tersebut, pemimpin harus tanggap dengan masalah yang ada pemimpin juga bisa mendongkrak kemampuan bawahannya dengan berbagai cara untuk memaksimalkan dan memberi pengetahuan yang lebih, contohnya dengan memberi pelatihan, sosialisasi, memberikan uang tambahana bagi yang bisa menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya.

Berikut ini akan ditampilkan berupa *output* pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah berupa buku laporan keuangan keuangan kecamatan Pagaden yang akan di tampilkan sebagai berikut:

Gambar 4.10
buku laporan keuangan keuangan kecamatan Pagaden



(Sumber: Dokumen BKAD 2019)

Gambar diatas merupakan hasil yang diperoleh atau *output* dari penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah berupa buku laporan keuangan keuangan kecamatan Pagaden. *Output* pada penerapan aplikas sistem informasi Aset pemerintah ini lebih banyak menghasilkan prodak erupa pembukuan-pembukuan laporan keuangan yang nantinya akan menjadi laporan keuangan yang untuk di pertanggung jawabkan kepada Bupati.

Penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang bertujuan untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan, laporan keuangan berupa pembukuan dari laporan keuanagn yang dihasilkan dari aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah masih dirasa belum memuaskan karena pada pelaksanaanya khususnya sumber daya manusia pada penerapannya kemampuannya belum sama rata sehingga belum maksimalnya sumber daya

manusia yang ada. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu aparatur bidang akuntansi t di kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang terkait dengan *output* pada penerapan sistem informasi Aset pemerintah sebagai berikut:

“kalau untuk apa yang dihasilkan atau produk apa yang di proleh dari penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini kalo dari kecamatan sendiri berupa buku laporan keuangan kecamatan perbulan maupun per semester, (3/07/2019)”

Maksud dari pernyataan aparatur bagian kuntansi kecamatan diatas ini yaitu *output* yang dihaslkan dari penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah berupa pembukuan laporan keuangan kecamatan perbulan maupun persemester,

Guna untuk mendapatkan produk atau hasil yang baik dari sistem informasi akuntansi pemerintah berupa *output* di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang menerapkan teknologi sebagai alat untuk membantu aparatur pemerintahan atau yang dikenal dengan *e-government*, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Teknologi ini dikembangkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang berupa Aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, yang diterapkan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Kecamatan bagian akuntansi diseluruh Kabupaten Subang.

Output pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yang di jalankan aparatur Bidanga Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Kecamatan bagian Aset diseluruh Kabupaten Subang dapat ditingkatkan perlakuan kerja oleh apartur yang menjalankan aplikasi sistem informasi akuntans

pemerintah dengan cara menerapkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kualitas kerja dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya pendekatan-pendekatan guna meningkatkan laporan keuangan yang baik sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dengan lebih baik. Intensifikasi adalah pengoptimalan laporan keuangan agar tersaji lebih baik. Sedangkan Ekstensifikasi laporan keuangan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud penambahan jumlah wajib laporan keuangan yang belum terdaftar dalam peraturan kementerian keuangan.

Penerapan aplikasi Sistem Informasi akuntansi Pemerintah dan kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempermudah dan meningkatkan kinerja dari Bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi diwujudkan dalam kegiatan kunjungan pengawasan dan penindakan terhadap inputan data yang salah dalam menginput data. Kegiatan tersebut dilakukan apabila terjadi kesalahan berupa ketidak sinkronan antara inputan data dari kecamatan pada aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah tersebut dijalankan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan yang sudah di paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Produktivitas khususnya *Output* pada peneran aplikasi sistem

informasi Akuntansi pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik.

4.2.1.3 Efektivitas Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Efektivitas berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasil-hasil yang diharapkan atau tingkat keluaran itu dapat dicapai ataukah tidak. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari jumlah hasil kerja, kualitas hasil kerja dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan.

Efektivitas kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang untuk menyelesaikan permasalahan pada laporan keuangan khususnya pada penginputan data dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah sudah baik dan prosesnya masih berjalan dan diperbaiki agar kualitas laporannya menjadi lebih baik. Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang dijalankan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan aparatur kecamatan bagian akuntansi untuk memenuhi target laporan keuangan yang lebih baik. Hal tersebut menjelaskan kualitas hasil kerja dan kemampuan aparatur dalam menyelesaikan permasalahan persoalan laporan keuangan yang dilakukan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah baik,

Kemampuan aparatur Kecamatan bagian akuntansi di Kabupaten Subang dan apartur bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang

pada penerapan Sistem informasi akuntansi pemerintah tujuan akhirnya yaitu membuat laporan keuangan yang baik diantaranya laporan keuangan kecamatan dan untuk selanjutnya dari bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membuat laporan keuangan serta pertanggungjaaban keuangan Kabupaten Subang. Ini menunjukkan bahwasanya kemampuan aparatur kecamatan bagian Aset dan apartur bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah baik.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan yaitu Ketua Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait keefektivitasan aplikasi yang sedang dijalankan yaitu aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah. Berikut ini hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan aparatur Bagian Akuntansi di Kecamatan seluruh Kabupaten Subang kalo menurut saya sudah efektif, karena dengan adanya aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah aparatur sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan sangat cepat serta bisa mengirit waktu. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pekerjaan aparatur dalam prakteknya sudah bisa dirasakan hasilnya sangat memuaskan.”03-07-2019”

Maksud daari pernyataan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten diatas terkait penerapan sistem informasi akuntansi pemerinta yaitu dalam penerapan nya sudah bisa dikatakan sangat efektif, karena dalam praktenya aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini sangat membantu sekali aparatur dalam bekerja, penerapannya juga oleh di aparatur sudah bisa dikatakan sangat efektif.

Sumber daya manusia sebagai peran utama dalam pelaksanaan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sangat di handalkan untuk menggapai suatu program agar berjalan dengan sesuai yang diharapkan sebelumnya agar terciptanya

suatu kata efektif dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemerintahnya. Sebuah progra atau penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah bisa dikatakan efektif jika dalam pelaksanaannya di dukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan ahli pada bidang itu sendiri baru bisa dikatakan program itu berjalan sangat efektif.

Jawaban serupa pada saat wawancara dengan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait efektivitas pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan aparatur Bagian Akuntansi di Kecamatan seluruh Kabupaten Subang kalo menurut saya sudah efektif, karena dengan adanya aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah aparatur sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan sangat cepat serta bisa mengirit waktu. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pekerjaan aparatur dalam prakteknya sudah bisa dirasakan hasilnya sangat memuaskan”03-072019”

Maksud dari pernyataan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten diatas terkait penerapan sistem informasi akuntansi pemerinta yaitu dalam penerapan nya sudah bisa dikatakan sangat efektif, karena dalam praktenya aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini sangat membantu sekali aparatur dalam bekerja, penerapannya juga oleh di aparatur sudah bisa dikatakan sangat efektif.

Efektivitasnya penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah tidak lepas dari keinerja aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri, dalam pelaksanaannya aparatur bidang akuntansi sangat serius dan gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknologi dari awal penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah itu di jalankan denga seluruh aparatur

akuntansi kecamatan Kabupaten Subang sampai aparatur dari kecamatan itu paham dan mengerti cara kerja pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini apabila dilakukan dengan baik, maksudnya dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan pada bidang teknologi dan di dukung oleh sumber daya manusia yang bagus dan tepat, maka berjalannya aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini sangat akan membantu pekerja aparatur pada bidang akuntansi.

Tantangan untuk efektivitas pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah di masa yang akan datang adalah berada pada sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi disini yang terkait teknologi yang digunakan untuk pemerintah yaitu *e-government* berupa sistem informasi akuntansi pemerintah. Dimana aparatur kedepannya harus lebih siap dalam kondisi yang serba teknologi sehingga aparatur dituntut untuk bisa menyesuaikan kemampuannya dengan kemajuan teknologi yang berjalan.

Kelemahan pada efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ini akan terjadi apabila penerapannya tidak diimbangi dengan kemampuan dan sumberdaya manusia yang bisa dan mampu menjalankan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah itu sendiri maka penerapannya tidak akan berjalan sesuai yang sudah diharapkan.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan di atas terkait efektivitas pada penerapan sistem informasi Aset pemerintah yang dijalankan oleh aparatur Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Bagian Akuntansi Kecamatan di Kabupaten subang sudah tercapai. Dilihat dari penerpan

sistem informasi akuntansi pemerintah ini sangat membantu pekerjaan aparatur dalam dalam menginput keuangan, efisien waktu yang baik dan mempermudah pekerjaan.

4.2.1.4 Efisiensi Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Efisiensi berkaitan dengan seberapa baik berbagai masukan itu dikombinasikan atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Ini merupakan suatu kemampuan untuk bagaimana mendapatkan hasil yang lebih banyak dari jumlah masukan yang paling minimum. Pengukuran efisiensi program dapat dilakukan dengan melihat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Efisiensi kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah dan bagian akuntansi di Kecamatan Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di bidang akuntansi bisa berupa efisiensi waktu pada saat penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, ketepatan waktu, efisien tenaga yang digunakan oleh pekerja atau aparatur bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun aparatur bagian akuntansi di Kecamatan. Penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintahan di bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Subang seharusnya tingkat efisiensinya tercapai, karena dengan menggunakan sebuah aplikasi untuk pekerjaan aparatur dalam tugasnya

maka diharapkan pekerjaan aparatur itu menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit,

Pada pelaksanaannya efisiensi waktu pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah belum berjalan dengan baik, karena masih ada kendala di lapangannya contohnya saja keterlambatan pada saat inputan data yang akan dimasukan kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Akan tetapi pada penerapan sistem informasi Aset pemerintah efisiensi aparatur dalam melakukan penginputan data masih berjalan kurang baik dikarenakan masih sering sekali aparatur kecamatan melakukan keterlambatan pada waktu yang di tentukan untuk inputan data pada aplikasi sistem informasi Aset pemerintah, seperti yang disampaikan oleh aparatur bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah pada saat di wawancarai.

“proses penginputan data yang dilakukan oleh aparatur kecamatan bagian Aset seringkali melakukan keterlambatan penginputan setiap bulannya, batas penginputan data yang seharusnya di lakukan dari tanggal 1-10 mereka terkadang mengisi inputan datanya pada tanggal 9-15”03-07-2019”

Pernyataan dari aparatur bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah diatas saya sebagai peneliti bisa menilai keadaan yang sedang berlangsung dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di kabupaten Subang ini belum berjalan dengan baik khususnya pada efisien waktu penginputan yang sudah di tentukan.

Megoptimalkan efisiensi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu dengan cara memberikan arahan kepada aparatur kecamatan bagian akuntansi sebagai aparatur yang menginput pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yang selanjutnya akan dikelola oleh aparatur bidang

akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu dengan cara memberikan peringatan lebih kepada aparatur dari kecamatan agar dalam penginputan datanya tidak sering melakukan keterlambatan, dan apa yang di inputkan berupa data angka pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah untuk diminimalisir kesalahan pengetikan angkanya.

Efisien penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di bidang akuntansi dan kecamatan sebenarnya belum bisa dikatakan baik, karena dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah, aparatur dari kecamatan yang seharusnya tidak perlu lagi pergi langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan data, kini aparatur dari kecamatan hanya perlu menginputkan data kedalam aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, dengan waktu yang relatif singkat aparatur kecamatan sudah bisa menyelesaikan inputan data yang harus di input kedalam sistem informasi akuntansi pemerintah. Efisiensi penerapan sistem informasi Aset pemerintah yang dilakukan oleh aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan aparatur bagian Aset Kecamatan tidak didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai, banyak sekali aparatur yang mengeluh khususnya aparatur bagian Aset dari kecamatan terkait inputan data pada sistem informasi Aset pemerintah. Sebenarnya inputan data pada sistem informasi Aset pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kecamatan masih banyak sekali kesalahan dalam penginputannya dikarenakan pada inputannya itu menginput angka, jadi sering sekali terjadi kesalahan menulis angka (*human error*).

Berdasarkan yang sudah di paparkan diatas, Efisiensi kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah belum berjalan dengan baik, dilihat masih ada kecamatan yang menginput data pada sistem informasi Aset pemerintah terlambat.

Berdasarkan pemaparan diatas berhubungan dengan produktivitas kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah. *Input, output,efektivitas* kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sudah berjalan dengan baik, hanya saja pada efisiensi penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah belum berjalan dengan baik.

4.2.2 Kualitas Layanan Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandak negatif terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap terhadap layanan yang dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Pelayanan adalah suatu interaksi langsung yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada

masyarakat. Kualitas Layanan sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kinerja ini dapat berupa tindakan yang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap siapapun. Kualitas layanan menjadi isu yang sangat penting dalam suatu proses pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat karena kualitas layanan akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat saat mendapatkan suatu pelayanan.

Kualitas layanan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah disini yaitu kualitas layanan berupa kualitas layanan penginputan data yang dilakukan oleh aparatur kecamatan bagian akuntansi dan kualitas layanan berupa pengelolaan pembukuan laporan keuangan yang dilakuakn oleh aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Untuk mengukur kualiatas layanan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, peneliti menggunakan beberapa indikator yang dianggap cocok untuk melihat secara baik terkait kualiatas layanan yang ada pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

4.2.2.1 Bukti Fisik Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

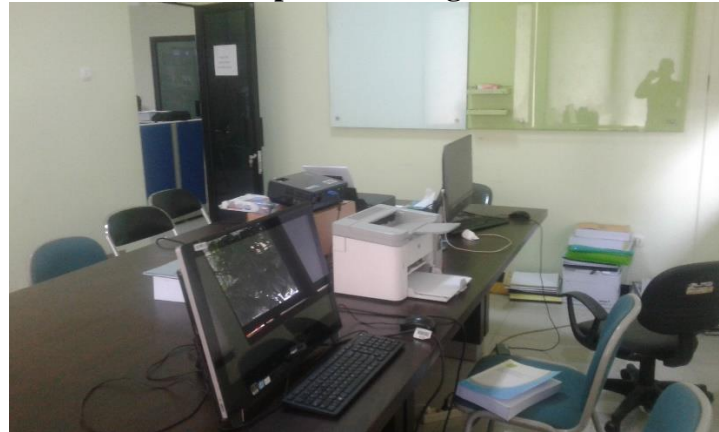
Bukti fisik merupakan salah satu faktor penting dari beberapa faktor yang memiliki pengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Bukti fisik sendiri merupakan wujud konkrit sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk

menunjang pelaksanaan pelayanan yang dapat terlihat dan digunakan oleh aparatur itu sendiri juga masyarakat selaku wajib pajak. Bukti fisik tersebut meliputi aparatur pelaksana, teknologi yang digunakan, ketersediaan SDM, gedung/bangunan dan alat-alat yang digunakan dalam proses pada pajak restoran.

Fasilitas Fisik penunjang pelaksanaan kerja aparatur Bagian Aset Badan Keuangan Aset Pemerintah Kabupaten Subang dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah yang digunakan dalam memberikan layanan pertanggung jawaban keuangan kepada menteri keuangan dirasa sudah cukup baik. Hal tersebut tergambar dengan tersedianya gedung kantor tempat proses pelaksanaan kerja aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan laporan keuangan. Kondisi sarana dan prasaran ruang kerja di Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah cukup baik.

Berikut ini merupakan sebuah foto Ruangan dan pasilitas di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang berkaitan dengan bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.11
Ruangan dan fasilitas di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Subang



(Sumber: Hasil Penelitian 2019)

Gambar diatas menunjukkan ruang kerja di Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Subang terkait sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan sistem informasi Aset pemerintah sudah baik, dari gambar diatas kita bisa melihat ada laptop dan print sebagai sarana penunjang kinerja aparatur bagian Aset untuk menerima inputan data pada sistem informasi Aset pemerintah.

Bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah memiliki kekuarangan juga dimana aparatur kecamatan yang diberikan laptop untuk menginput data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah tidak diikuti dengan akses internet yang memadai di kecamatan itu, sehingga aparatur bagian akuntansi di kecamatan harus membei kuota internet sendiri untuk melakukan proses penginputan data pada aplikasi sistem informasia kuntansi pemerintah.

Bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yang peneliti temukan dilapangan sebenarnya bukti fisik penunjang kinerja aparatur itu sendiri dalam penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sebenarnya sudah baik, peneliti menemukan beberapa alat teknologi penunjang penerapan aplikasi diantaranya di kantor bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah ada penunjang seperti Laptop, Komputer, Internet dan lain sebagainya yang mendukung penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Sejalan dengan apa yang peneliti temukan dilapangan ketika mewawancarai aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait bukti fisik atau bukti pisik pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“kalau untuk penunjang penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah disini kita sudah diberikan alat pendukung berupa Laptop, Komputer, Internet dan lain sebagainya, alat alat teknologi ini sangat membantu kita sebagai aparatur di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menerima inputan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah oleh aparatur bagian akuntansi di kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait *tangible* atau bukti pisik mengatakan bahwa pada pelaksanaannya aparatur di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dipasilitasi oleh teknologi untuk membantu dalam penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah berupa diantaranya laptop, komputer, printer dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan sebuah foto ruang kerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang berkaitan dengan bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.12
Ruang kerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah



(Sumber: Hasil Penelitian 2019)

Gambar diatas merupakan gambar di ruangan kantor bidang akuntansi Badan Keuangna Aset Daerah Kabupaten Subang, dari gambar diatas kita bisa melihat bahwasannya dalam bekerja khususnya pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sudah ada alat pendukung berupa Komputer dalam pekerjaanya,

Bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasia akuntansi pemerintah juga berada pada ranah kecamatan dimana aparatur bagian akuntansi kecamatanlah yang menginput data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, disini peneliti juga melihat bagaimana *Tangible* atau bukti fisik yang berada di kecamatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan aparatur bagian akuntansi di salah satu kecamatan di Kabupaten Subang terkait *Tangible* atau bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasia akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“kalau untuk *Tangible* atau bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasia akuntansi pemerintah yang berada di kecamatan ini adalah Laptop, jadi kita semua aparatur bagian akuntansi kecamatan di Kabupaten Subang diberikan sebuah laptop untuk menunjang atau membantu penyelsaian inputan pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemrintah.”

Hasil wawancara diatas dengan aparatur bagian akuntansi di salah satu kecamatan di Kabupaten Subang terkait *Tangible* atau bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasia akuntansi pemerintah mengatakan bahwa pada pelaksanaanya setiap aparatur bagian akuntansi kecamatan di Kabupaten Subang diberikan sebuah laptop untuk menunjang pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Tantangan kedepannya bagi *tangible* atau bukti fisik terkaita penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu kemajuan teknologi yang semakin cepat harus bisa dipesiapkan untuk berbagai kenadala yang akan akan terjadi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah itu sendiri, sebagai contoh keamanan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah harus di perketat, karena takutnya sistem yang ada bisa di selusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan yang akan akan merugikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

Berikut ini merupakan sebuah foto gudang pengarsipan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang berkaitan dengan *Tangible*, atau bukti fisik

pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.13
Gudang pengarsipan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang



(Sumber: Hasil Penelitian 2019)

Gambar diatas merupakan gudang penyimpanan arsip arsip penting berupa laporan keuangan ataupun laporan pertanggung jawaban keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah mempunyai tempat yang baik karena memiliki ruangan tersendiri dan sudah tertata dengan baik .

Berdasarkan yang sudah di paparkan diatas terkait *Tangible* atau bukti fisik pada penerapan aplikasi sistem informasia akuntansi pemerintah maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelayanan khususnya *tangible* pada peneran aplikasi sistem informasi Aset pemerintah di Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah dengan baik.

4.2.2.2 Kehandalan Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Kehandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Akurasi pelayanan menyebutkan bahwa pelayanan dimaksud berkaitan dengan kehandalan pelayanan dan bebas dari kerusakan. Ketepatan dalam pelayanan sangat diperlukan agar para masyarakat yakin bahwa apa yang ia peroleh sudah benar, baik dari aspek kelengkapan administratif maupun prosedur.

Kehandalan merupakan jaminan atas kesanggupan, atau kemampuan aparatur dalam hal memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat yaitu, kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, pemenuhan kebutuhan masyarakat semenjak awal dan setiap saat, melakukan sesuatu secara benar semenjak awal, dan sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan masyarakat. Kehandalan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan agar kualitas pelayanan sebagai penyedia jasa layanan tetap terjaga. Bila jasa yang diberikan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada pelaksanaan pelayanan yang baik maka faktor kehandalan akan tumbuh dengan sendirinya.

Kehandalan kinerja aparatur pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sudah bisa dikatakan baik, karena aparatur kecamatan sebagai penginput data sudah dikatakan mampu untuk melaksanakan tugasnya dalam penginputan pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah. Pada awal penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, aparatur yang berkaitan atau berhubungan dengan penerapan aplikasi tersebut diberikan bekal berupa

pendidikan teknologi, sosialisasi tentang sistem informasi akuntansi pemerintah oleh aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang supaya aparatur bagian akuntansi kecamatan ini mempunyai kemampuan dan bisa menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah.

Pada pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur kecamatan bagian Aset dan aparatur bagian akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah, kehandalan yang ditunjukkan aparatur diwujudkan dalam bentuk proses penginputan data pada sistem informasi akuntansi pemerintah yang selanjutnya akan di bukukan dan dibuat pertanggung jawaban dan selanjutnya untuk diserahkan kepada menteri keuangan. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang cepat berupa penginputan data yang cepat dan akurat pada sistem informasi akuntansi pemerintah, memang menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas layanan yang diberikan oleh Bagian Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Subang

Kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah menjadi sebuah kewajiaban aparatur untuk memiliki kemampuan atau kehandalan untuk pekerjaannya disini khususnya pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sudah dikatakan cukup baik karena aparatur sudah mempunyai kemampuan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Kemampuan aparatur bagian akuntansi kecamatan dan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang menjadi faktor utama keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi

pemerintah, karena apabila aparturnya tidak mempunyai kemampuan yang memumpuni atau tidak layak maka penerapan aplikasi ini tidak akan berjalan dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu diantaranya sebagai berikut:

“saya rasa kalau untuk Kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah baik itu oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan maupun aparatur di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang itu sendiri, karena kita sebagai pelaksana sudah melakukan beberapa kegiatan yang dianggap bisa membekali aparatur agar bisa menjalankan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, mulai dari bimbingan teknologi, sosialisasi penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait Kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah mengatakan bahwa kehandalan aparatur yang menjalankan sistem informasi akuntansi pemerintah sudah bisa dikatakan mampu atau handal, karena pada saat penerapan aplikasi itu berjalan dulu aparatur dari bagian akuntansi kecamatan diberikan bimbingan belajar diantaranya seperti bimbingan teknologi dan sosialisasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

Kehandalan atau kemampuan yang dimiliki aparatur pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah baik itu aparatur bagian akuntansi kecamatan maupun aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sudah bisa dikatakan baik, mereka sudah bisa mengoperasikan atau

menjalankan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah dengan baik dan menjalankan tugas terkait penginputan data pada aplikasi dengan baik.

Aparatur yang tidak mempunyai keahlian atau kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang diberikan bimbingan teknologi untuk menunjang kinerjanya, kalau untuk kemampuan atau kehandalan oleh aparatur di bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah bisa dikatakan sangat baik, karena mereka sudah menguasai betul tentang teknologi sehingga ketika pada saat penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi berjalan mereka tidak begitu gagap teknologi.

Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana kehandalan aparatatur pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah khususnya seluruh aparatatur bagian akuntansi yang berada di kecamatan Kabupaten Subang, Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu aparatatur bagian akuntansi di Kabupaten Subang terkait kehandalalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau Kehandalalan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah khususnya saya aparatatur bagian akuntansi kecamatan sudah bisa menjalankan dan mampu mengoperasikan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, kemampuan saya ini berkat program program yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, jadi kami diberikan pendidikan berupa bimbingan teknologi dan sosialisasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatatur bagian akuntansi kecamatan terkait khususnya kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah yaitu mengatakan bahwa mereka aparatatur bagian akuntansi

dikecamatan merasa sudah mempunyai kehandalan atau kemampuan dalam penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, dan mengatakan kalau kemampuan atau kehandalannya yang didapat merupakan program dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menginginkan aplikasi sistem informasi akuntansi berjalan dengan baik yaitu salah satunya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan aplikasi tersebut dengan cara diberikan bimbingan belajar berupa bimbingan teknologi dan sosialisasi penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah kepada aparatur bagian akuntansi kecamatan.

Berdasarkan pemaparan tentang kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam kualitas layanan khususnya kehandalan pada penerapan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah di Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik. Dilihat dari aparat yang sudah bisa menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah secara baik.

Berdasarkan pemaparan tentang kualitas layanan kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam kualitas layanan pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik.

4.2.3 Responsivitas Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Responsivitas kinerja aparatur pada bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah cukup baik namun memang masih ada saja permasalahan yang dihadapi. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan yang diinginkan, menyusun agenda dan prioritas pada pelayanan serta mengembangkan seluruh program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Responsivitas Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah akan dianalisis lebih rinci dengan pembahasan berikut:

4.2.3.1 Misi Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Misi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sejalan dengan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang itu sendiri yaitu Untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan tugas daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, sudah menjadi tugas penting Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

Tugas penting tersebut adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai atau mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas daerah, oleh karena itu sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus diarahkan atau berorientasi kepada tugas yang diembannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai Visi “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Dinamis dan Akuntabel dalam Menunjang Visi Misi Kabupaten Subang”. Dengan visi misi ini terkandung maksud semua aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang tergerak/termotivasi/terpacu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dan penerimaan bagian daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perluasan cakupannya, dengan demikian diperlukan upaya peningkatan penggalian potensi sumber daya PAD yang ada dan perluasan objek dan subjek jenis pungutan, peninjauan dan penyesuaian tarif pungutan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Sebagai operasionalisasi landasan filosofis atau visi adalah

misi, sedangkan misi yang diemban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Subang adalah:

- Misi Pertama : Meningkatnya Pendapatan Daerah;
- Misi Kedua : Tertibnya Penyusunan Anggaran;
- Misi Ketiga : Terciptanya Pelayanan Administrasi Keuangan;
- Misi Keempat : Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel;
- Misi Kelima : Tercatatnya Aset Daerah;
- Misi Keenam : Meningkatnya Sumber daya Manusia yang Profesional;

Kinerja aparatur Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada visi dan misi yang diusung, diharapkan dapat membuat kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi meningkat dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuang Aset Daerah Kabupaten Subang terkait visi pada penerapan aplikasi sitem informasi akuntansi pemerintah, berikut ini hasil wawancaranya sebagai berikut:

“kalau untuk visi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ya kita menggunakan atau berpedoman kepada misi atau visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yang keempat yaitu tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel.”

Dari hasil wawancara diatas dengan kepala bidang akuntansi Badan Kaeuangan Aset Daerah Kabupaten Subang mengatakan bahwa misi atau visi yang digunakan pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah berpedoman kepada visi/misi Badan Kaeuangan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel.

Misi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur yang menjalankan aplikasi tersebut, karena dengan kita berpedoman kepada misi/visi maka tujuan kerja yang dilakukan akan

berjalan maksimal dan menyesuaikan untuk menggapai misi/visi yang sudah direncanakan. Aparatur bagian akuntansi kecamatan dan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahnya mereka selalu berpedoman dengan visi/misi Badan Kaeuangan Aset Daerah Kabupaten Subang

Peneliti juga menggali lebih dalam terkait visi pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah di lapangan yaitu dengan cara mewawancarai salah satu aparatur bagian akuntansi di kecamatan Kabupaten Subang, berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur bagian akuntansi kecamatan.

“pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ini kami aparatur bagian akuntansi dari kecamatan terkait visi/misi kami sepenuhnya berpedoman kepada visi/misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel, disini kita melaksanakan tugas pada saat penginputan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah secara baik guna mendukung visi tersebut”

Hasil wawancara diatas dengan aparatur bagian akuntansi di kecamatan Kabupaten Subang mengatakan bahwa misi atau visi (terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel) yang digunakan pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu visi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel, dan kemudian mengatakan cara untuk mendukung visi tersebut yaitu dengan menerapkan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah khususnya pada penginputan data secara baik dan benar.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan, maka misi dan visi kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ini sudah berjalan dengan baik, aparatur yang menerapkan sistem informasi akuntansi pemerintah mendukung penuh visi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel dengan cara bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.

4.2.3.2 Tujuan Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang mana ia bersifat kuantitatif dan merupakan sebuah pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam merumuskan tujuan ini harus bersikap cerdas atau *smart*, yaitu *specific, measurable, action-oriented, realistic* dan juga *timely*, atau spesifik atau khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Tujuan pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sejalan dengan visi Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel dimana tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ini harus didukung oleh kinerja aparatur yang mempunyai kemampuan yang baik dalam kerja khususnya pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

Kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas sangat mempengaruhi sekali untuk menjalankan seberapa efektif manakah aplikasi itu di jalankan dengan kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas. Kemampuan sumberdaya manusia seringkali menjadi alasan dalam penerapan aplikasi penunjang kinerja pemerintah di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Subang dalam penerapan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah di Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempermudah kinerja aparatur agar lebih efisien ,singkat dan tidak memakan waktu yang lama tidak dapat dipungkiri adalah salah satu hal yang diharapkan oleh banyak aparatur untuk mempermudah segala bentuk proses pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur dan akan mempermudah tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah itu sendiri karena didukung oleh alat-alat teknologi yang baik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang menerapkan sistem informasi akuntansi pemerintah guna menunjang atau mendukung dari visi/misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang itu sendiri, dengan adanya aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah diharpkan terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan untuk menggali informasi terkait tujuan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, yang dilakukan dengan kepala bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, berikut ini hasil wawancaranya:

“kalau untuk tujuan pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ini utamanya untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan

akuntabel yaitu merupakan visi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, dengan adanya tujuan ini maka kinerja aparatur pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah pasti mempunyai target pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga kinerjanya pun harus sungguh-sungguh.”

Hasil wawancara diatas dengan kepala bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengenai tujuan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah mengatakan bahwa tujuan penerapan pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini tujuan utamanya yaitu untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel yaitu merupakan visi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, beliau juga mengatakan bahwasanya apabila ada suatu tujuan maka kinerja aparatur akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menggapai tujuan tersebut agar bisa di capai.

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang sejalan dengan visi/misi organisasi tersebut, disini tujuan pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sejalan dengan visi/misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel.

Kemudian peneliti juga menggali lebih lagi terkait tujuan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah dengan melakukan wawancara dengan salah satu aparatur bagian akuntansi kecamatan, berikut ini hasil wawancara dengan aparatur bagian akuntansi kecamatan:

“yang saya ketahui tentang tujuan pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah ini yaitu untuk membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan”

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa tujuan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah itu untuk membuat laporan keuangan dan laporan

pertanggungjawaban keuangan, walaupun demikian sebenarnya tujuannya akhirnya itu akan sama seperti visi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan yang dinamis dan akuntabel

Berdasarkan pemaparan di atas baik itu observasi maupun wawancara terkait tujuan kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah pada pelaksanaannya sudah baik. Dilihat pada penerapan oleh aparatur pemerintahnya sudah mengetahui secara baik tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas baik itu observasi maupun wawancara terkait responsivitas kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sudah baik. Dilihat dari aparatur yang menjalankan pekerjaannya selalu berpedoman kepada misi/visi dan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

4.2.4 Responsibilitas Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Responsibilitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan persesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas berkaitan dengan kedisiplinan kerja yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Kedisiplinan tersebut dilaksanakan sebagai komitmen dan konsistensi terhadap program kerja yang telah ditetapkan Bagian Aset Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Subang dalam penerapan Sistem Informasi Aset Pemerintah dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Namun dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tanggung jawab berbenturan dengan tanggung jawab.

Tanggung jawab kinerja aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah belum cukup baik. Masih ada aparat kecamatan yang terlambat dalam mengirimkan data yang dilakukan setiap bulannya dan sering juga terjadi kesalahan pengetikan angka pada saat penginputan datanya. Proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan aparat kecamatan dalam menginput data pada sistem informasi Aset pemerintah dilakukan belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Pengontrolan dan penindakan terhadap penginputan data yang telat dan penginputan data yang masih salah dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah juga dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku, adalah salah satu konten dari program intensifikasi. Pemberian peringatan, surat teguran/ peringatan (SP) dilakukan secara administratif. Ada bukti fisik bahwa penindakan tersebut telah dilaksanakan dan nantinya akan dilaporkan dalam laporan kegiatan harian dari aparat yang melakukan pengontrolan atau penindakan tersebut, contoh bukti fisik nya yaitu dilakuakn koreksi inputan data ulang oleh aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

Tanggung jawab pada penerapan sistem informasi pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten disini peneliti menggunakan beberapa indikator yang dianggap bisa melihat tanggung jawab yang terjadi pada

penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah diantaranya yaitu tanggung jawab dan kerja sama yang akan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.4.1 Tanggung Jawab Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung Jawab merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi insiatif, berhasil atau tidaknya kinerja pegawai dapat diukur dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki pegawai atau petugas terhadap pekerjaannya. Aparatur Bagian

Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Tanggung jawab pada penerapan aplikasi sitem informasi akuntansi pemerintah merupakan rasa tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan atau penginputan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yang dilakukan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan dan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang. Untuk bisa mengetahui seberapa besar rasa tanggung jawab aparatur terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, peneliti juga melakukan wawancara dilapangan dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Suabang karena dianggap mengetahui betul pola tingkah laku bawahanya, berikut ini hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya rasa kalau untuk mengetahui tanggung jawab pada penerapan aplikasi sitem informasi akuntansi pemerintah yang dijalankan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan dan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, aparatur yang mempunyai tugas tersebut sudah memenuhi rasa tanggung jawabnya dalam pengoprasian pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah khususnya pada penginputan datanya.”

Hasil wawancara diatas dengan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengenai tentang tanggung jawab pada penerapan aplikasi sitem informasi akuntansi pemerintah yaitu beliau mengatakan bahwasannya rasa tanggung jawab pada aparatur pemerintah yang menjalankan atau mempunyai tugas pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sudah

berjalan dengan baik, dan tanggung jawabnya bisa menyelesaikan semua urusan pekerjaannya yang diberikan.

Tanggung jawab pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah juga meliputi tanggung jawab aparatur yang diberikan tugas dalam penginputan data pada aplikasi dan rasa tanggung jawab kepala bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terhadap apapun yang dilakukan oleh bawahannya terkait penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah itu sendiri. Mengenai tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan penerapan sistem informasi Aset pemerintah, Kepala Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang selaku penanggung jawab atas dilaksanakannya penerapan sistem informasi Aset pemerintah bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan bawahannya. Salah satu bentuk tanggung jawabnya yaitu melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan membuat laporan keuangan.

Aparatur bagian akuntansi di Kecamatan sangat dituntut tanggung jawabnya dalam penginputan data yang dilakukan setiap bulannya kedalam aplikasi sistem informasi Aset pemerintah. Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu aparatur bagian Aset kecamatan:

“Rasa tanggung jawab saya untuk menginput data pada aplikasi sistem informasi Aset pemerintah pasti ada, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya, jadi saya setiap bulannya selalu melaksanakan tanggung jawab saya dalam menginput data pada sistem informasi Aset pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan aparatur dari kecamatan, menyatakan bahwa mereka masih melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik,

mereka masih melakukan inputan data setiap bulannya kedalam aplikasi sistem informasi Aset pemerintah karena sudah merupakan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan.

Hal serupa juga peneliti gali terkait rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang selaku aparatur yang mengelola hasil inputan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yang dilakukan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan.

Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang juga peneliti menggalinya dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, dibawah ini akan dilampirkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penelii dengan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut:

“Tanggung jawab kami pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah selaku aparatur bidang akuntansi adan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang yang menerima inputan data pada aplikasi tersebut untuk dijadikan laporan keuangan mempunyai rasa tanggung jawab yaitu membuat atau menyusun inputan-inputan yang diberikan oleh semua aparatur bagian akuntansi yang ada di Kabupaten Subang untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban dan pembukuan laporan keuangan.”

Hasil wawancara diatas dengan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengatakan bahwa tanggung jawab yang mereka emban dalam hal penyusunan inputan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah yang dilakukan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan mereka melaksanakan dengan baik karena, ketika ada inputan data masuk setiap

bulannya mereka harus siap untuk menyusunnya untuk dijadikan laporan keuangan bulanan maupun laporan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah untuk kedepannya akan lebih berat karena dimasa depan yang akan akan datang teknologi akan semakin maju, alat alat teknologi juga akan semakin canggih, sehingga dalam penerapan sistem informasia akuntansipun akan terbawa arus kemajuan jaman, oleh karena itu aparatur harus sisap dan mempersiapkan bekal yang cukup terhadap kemajuan teknologi yang sedang berlangsung ini karena tanggung jawabnya juga akan semakin besar.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait rasa tanggung jawab aparatur dalam penerapan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah baik itu aparatur bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang maupun aparatur Kecamatan sudah mempunyai rasa tanggung jawab yang baik terkait penerapan sistem informasi Aset pemerintah.

4.2.4.2 Kerja Sama Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi social antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kejasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Setiap individu yang bekerja memiliki keterbatasan, maka dibutuhkanlah kerjasama

dalam tim untuk dapat saling melengkapi sehingga tujuan dan hasil keinerja akan dapat dicapai.

Kerja sama pada penerapan sistem informasi aset pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan aparatur bidang akuntansi kecamatan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerinta, dimana kerja samanya itu berupa kerja sama aparatur bagian akuntansi kecamatan menginputkan data pada aplikasi sistem informasi akuntansi pemerinta dan aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang lah yang mengelola hasil inputan tersebut.

Mengenai kerjasama aparatur Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah dan pendampingan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik, aparatur Pemerintahan Bagian Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang menjelaskan dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan, melakukan kerjasama antara aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dengan aparatur kecamatan.

Kerjasama kinerja aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan aparatur Kecamatan dirasa cukup baik berikut hasil penelitian peneliti dengan salah satu aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengenai kerjasama sebagai berikut:

“Kerja sama yang kami lakukan dari aparatur bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten subang dengan aparatur bagian Aset di kecamatan sangatlah baik, karena setiap bulannya kami sering berkomunikasi dengan aparatur kecamatan bagian Aset perihal penginputan

data kami sering bekerja sama agar aparaturnya dari kecamatan menginputkan data pada aplikasi sistem informasi Aset pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dengan aparaturnya bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, karena satu sama lain saling membutuhkan sehingga terjalin kerja sama yang baik.

Kerjasama pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah juga melibatkan kerja sama antara Ketua Bidang Akuntansi dengan bawahannya yang mengoperasikan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, dimana ketua bidang selalu melakukan perintah terhadap bawahan untuk melakukan pekerjaan dan bawahannya melaksanakan perintah atasannya.

Disini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang terkait kerja sama pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“Pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah ini kerjasama antara aparaturnya dengan aparaturnya lainnya maupun dengan saya sebagai kepala bidang akuntansi terjalin sangat baik, kita sering melakukan komunikasi untuk melakukan kerjasama yang baik antara pemimpin dan bawahan, saya melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik dengan bawahan saya, karena apabila kerjasama kita baik maka akan menghasilkan hasil kerja yang baik juga.”

Dari hasil wawancara peneliti di atas dengan ketua bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang maksudnya yaitu kerjasama yang ada pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sangat terjalin dengan baik, baik itu kerjasama antara pemimpin dengan bawahan maupun aparaturnya dengan aparaturnya lainnya, menurut beliau, beliau selalu melakukan komunikasi yang baik dengan bawahannya agar terjalin hubungan kerjasama yang

baik, karena apabila sudah terjalin hubungan kerja sama yang baik maka akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik juga.

Kerjasama dalam menjalankan sistem informasi akuntansi pemerintah harus melakukan kerjasama yang baik, karena dalam penerapannya aplikasi ini tidak bisa berjalan satu arah, aplikasi ini berjalan dua arah maksudnya ada kerjasama antar aparat bagian akuntansi kecamatan dengan aparat bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

Berikut ini foto menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilakukannya sosialisasi penerapan sistem informasi Aset pemerintah dengan aparat bagian akuntansi kecamatan.

Gambar 4.14
Sosialisasi penerapan sistem informasi Aset pemerintah dengan aparat bagian akuntansi kecamatan



(Sumber: Dokumen BKAD 2017)

Gambar diatas menunjukkan kerja sama berupa sosialisasi yang dilakukan aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Aparatur Kecamatan dalam penerapan aplikasi sistem informasi Aset pemerintah. Bentuk kerja sama antar aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dan Aparatur Kecamatan dapat dikatakan optimal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kerjasama sama aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang melakukan kerja sama dengan aparatur di mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah dapat disimpulkan kerjasama aparatur yang sudah optimal. Bentuk kerjasama yang terjadi antara aparatur berjalan dengan baik sehingga kegiatan maupun tujuan dapat dicapai dengan mudah dan jelas. Bentuk kerjasama yang terjadi antara aparatur di Dinas dengan aparatur di Kecamatan berjalan dengan baik juga, sehingga aparatur dari Dinas dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada pada penerapan sistem informasi Aset pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait Responsibilitas pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam responsibilitas pada penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik.

4.2.5 Akuntabilitas Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu mempersentasikan kepentingan rakyat dalam konteks ini konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target kinerja sebaiknya harus Dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi Kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat

Pada pelaksanaannya, akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan sistem informasi Aset pemerintah sudah cukup baik. Memperhatikan nilai dan norma yang berkembang di lingkungan aparatur menjadikan kinerja dan proses penerapan sistem informasi Aset pemerintah sudah cukup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Namun menurut Kepala Bagian Aset selaku yang bertanggung jawab atas penerapan sistem informasi Aset pemerintah, khususnya penginputan data yang di lakukan oleh kecamatan harus lebih di perhatikan ,supaya menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Akuntabilitas kerja aparatur Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dalam menjalankan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa sudah cukup baik. Prinsip keadilan, hak asasi manusia, jaminan penegakan hukum dan orientasi pelayan yang dikembangkan terhadap masyarakat selaku pengguna jasa secara umum sudah dapat dirasakan baik oleh masyarakat. Laporan Pertanggungjawaban keuangan Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang tiap tahunnya menjadi salah satu media yang digunakan untuk menegaskan keakuntabilisan kinerja Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Akuntabilitas kinerja aparatur pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah adalah suatu tindakan keharusan atau kewajiban aparatur Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagai pengelola penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah dalam menanggung akibat dari penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah. Akuntabilitas pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah dimaksudkan adalah suatu tindakan keharusan atau kewajiban aparatur sebagai pengelola aplikasi dalam menanggung akibat dari penyelenggaraan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang Harus siap menerima kritikan, saran dan keluhan yang dilayangkan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan. harus memberikan jawaban dan solusi atas keluhan dan komplain yang dilayangkan oleh aparatur kecamatan bagian akuntansi dengan ramah dan bersahabat.

Akuntabilitas penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yang diselenggarakan oleh birokrasi, dalam hal ini ialah sebagai pengelola

berkewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa menciptakan akuntabilitas berarti menelaraskan prosedur penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat demi kepuasan pelanggan.

Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak saja menguntungkan bagi masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah dituntut untuk memberikan kualitas pengelolaan yang baik dengan tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku terkait dengan akuntansi.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan ketua bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang berkaitan dengan akuntabilitas penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan dengan akuntabilitas penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, aparatur sudah bertanggung jawab sesuai undang-undang yang berlaku. Aparatur terbuka untuk menerima kritikan dari aparatur bagian akuntansi kecamatan maupun masyarakat mengenai pengelolaan yang diberikan oleh aparatur” (07-Juli-2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ketua bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang mengenai akuntabilitas pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah mengatakan bahwa aparatur sudah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada dan

aparatur juga siap menerima kritikan maupun masukan dari aparatur bagian akuntansi kecamatan maupun masyarakat.

Akuntabilitas penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dinilai dari manfaat yang dirasakan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan maupun masyarakat dari penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yang sudah diterima. Upaya-upaya atau proses proses penerapan aplikasi mulai dari perencanaan program yang efektif dan efisien, penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah sesuai pedoman Akuntansi dan aturan yang ada, ketercapaian dan keberhasilan dari target program-program yang telah disusun dan upaya yang dilakukan agar segala sumber daya yang ada dapat berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi, misi dan tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

Oleh karena itu, peran serta aparatur bagian akuntansi kecamatan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sangat dibutuhkan selain sebagai pengguna penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah, aparatur bagian akuntansi juga berperan sebagai controlling/pengawas dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kinerja aparatur yang tidak maksimal atau melanggar prosedur dan ada kekurangan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah maka masyarakat dapat menyampaikan keluhan, kritikan Hal ini, diharapkan agar adanya perbaikan dari mekanisme yang ada sebelumnya dan para aparatur dalam penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik.

Contoh lain dari akuntabilitas pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah yaitu ketika aparatur bagian akuntansi sebagai pengguna aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah mengadu atau mengeluh kepada aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagai pengelola sekaligus yang menggunakan juga aplikasi sistem informasi akuntansi pemerintah, aparatur bagian akuntansi kecamatan biasanya mengeluh terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa akuntabilitas penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah sudah baik. Hal ini terlihat dari bagaimana pihak aparatur bidang akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang menanggapi berbagai macam keluhan dan komplain yang dilayangkan oleh aparatur bagian akuntansi kecamatan dengan ramah dan bersahabat.